

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PELALAWAN

Sella Pitaloka¹

¹Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi
Universitas Islam Riau
e-mail : sellapitaloka2020@gmail.com

Histori artikel

Abstrak

Received:

05 12 2024

Accepted:

10 12 2024

Published:

31 12 2024

Stunting adalah masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, serta produktivitas anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Pelalawan, menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, camat, serta keluarga dengan anak stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Aspek komunikasi telah dilakukan melalui penyuluhan rutin, namun metode penyampaian yang kurang interaktif menghambat pemahaman masyarakat. Ketersediaan sumber daya manusia, terutama kader posyandu, masih kurang secara kuantitas, meskipun tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang memadai. Hambatan lain termasuk kurangnya penerimaan masyarakat karena faktor kepercayaan serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk mendukung implementasi kebijakan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan membutuhkan peningkatan dalam komunikasi, sumber daya, dan penyusunan SOP untuk mendukung efektivitas program. Temuan ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan wilayah lainnya.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, stunting, pelalawan

Stunting is a chronic nutritional problem that affects the physical growth, intellectual development, and future productivity of children. This study aims to analyze the implementation of stunting reduction policies in Pangkalan Kerinci District by the Pelalawan Regency Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office, using indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection through

How to cite:

Pitalola, S., (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Rivda*. 2(2).

E-ISSN:

2988 - 5833

Published by:

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan

in-depth interviews and observation. Informants consisted of the head of the agency, head of the field, sub-district head, and families with stunted children. The results showed that policy implementation was not optimal. Communication aspects have been carried out through routine counseling, but less interactive delivery methods hinder community understanding. The availability of human resources, especially posyandu cadres, is still lacking in quantity, although health workers have sufficient competence. Other barriers include the lack of community acceptance due to trust factors and the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) to support policy implementation. In conclusion, policy implementation requires improvements in communication, resources, and the development of SOPs to support program effectiveness. These findings are expected to be the basis for improving stunting reduction policies in Pangkalan Kerinci sub-district and other areas.

Keywords: implementation, policy, stunting, pelalawan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan "Bahwa kesehatan ialah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan UU Negara RI Tahun 1945". Regulasi terkait dengan kesehatan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Indonesia mempunyai masalah Gizi yang cukup berat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk pada anak balita. Balita pendek (stunting) adalah masalah kurang gizi kronis sehingga berdampak gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Menurut Hawi *et al.* (2020) menyebutkan bahwa kejadian balita pendek atau stunting adalah salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017 sebesar 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting.

Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menyebutkan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang bertujuan untuk: 1. Menurunkan prevalensi stunting, 2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, 3. Menjamin pemenuhan asupan gizi, 4. Memperbaiki pola asuh, 5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan 6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Sejauh ini masyarakat belum menyadari pentingnya pengasuhan gizi yang baik bagi keluarga. Demikian pula dengan pengasuhan bagi balita dan ibu hamil belum menjadi perhatian khusus. Kebiasaan menggunakan air bersih dan sarana sanitasi, belum menjadi suatu hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

Anak membutuhkan orang tua untuk menyediakan makanan dan pengasuhan mereka. Kesibukan orang tua menyebabkan anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik. Anak tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung dari orang tua, tapi pengasuhan beralih kepada anggota keluarga lain bahkan di luar anggota keluarga. Penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh makan dan pola asuh kesehatan dengan status gizi anak (Pratiwi *et al.*, 2016), serta (Masithah *et al.*, 2005).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang sedang berupaya untuk menurunkan stunting di daerahnya. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci termasuk salah satu dari lokasi yang terdapat kasus stunting di Kabupaten Pelalawan dengan prevalensi kasus stunting sebesar 54%. Adapun jumlah kasus stunting tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Stunting di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Anak Stunting	
		Sangat Pendek	Pendek
1	2	3	4
1	Pangkalan Kerinci	26	135
2	Pangkalan Kuras	2	7
3	Bandar Seikijang	4	4
4	Langgam	0	3
5	Pelalawan	14	10
6	Bandar Petalangan	4	31
7	Pangkalan Lesung	0	1
8	Ukui	0	7
9	Kerumutan	1	8
10	Bunut	5	5
11	Teluk Meranti	1	6
12	Kuala Kampar	4	21
Jumlah		61	238

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak stunting masih tinggi di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan belum mencapai target dari ketetapan WHO sebesar 20%. Peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya menanggulangi permasalahan stunting, diharapkan dapat menekan resiko munculnya stunting pada anak balita. Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka judul masalah dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan”**.

Dengan diidentifikasinya beberapa masalah yang menjadi dasar penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan? 2. Apakah faktor penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan?

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menguraikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2012). Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih banyak ditemukan kasus stunting dan belum mencapai target dari ketetapan WHO sebesar 20%.

Key informan atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat dalam penelitian ini sebanyak satu orang, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Adapun informan pendukung terdiri dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPAPPKB Kabupaten Pelalawan, Camat Kerinci, keluarga dengan status anak stunting. Dari keseluruhan jumlah *key informan* dan informan pendukung berjumlah 5 orang.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (Nuridin, & Hartati, 2019). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi di lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur - literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dari sumber data utama yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat

yang terkait dengan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Stunting merupakan bentuk akibat adanya kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada balita akibat adanya akumulasi tidak cukup nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Kurangnya gizi yang terjadi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini juga akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental dari sang anak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah terhadap gizi stunting memiliki resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami adanya penyakit degeneratif di masa yang akan datang.

Aryastami (2017), menjelaskan bahwa “Untuk mencegah masalah stunting dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi”. Dalam studi lain, Pimanto & Puspitasari (2024), menyampaikan bahwa “Tantangan utama dalam pelaksanaan intervensi pencegahan stunting terintegrasi adalah membangun komitmen dan dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan tertinggi”. Oleh karena itu, Bupati Pelalawan sebagai kepala daerah terus berupaya melakukan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Pelalawan. Salah satu upaya yang dilakukan Bupati Pelalawan terkait masalah stunting tersebut yaitu melaksanakan acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Acara ini dilaksanakan di ruang kerja Asisten III kantor Bupati Pelalawan dihadiri oleh Asisten III, Staf Ahli, Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan yang diwakili Kabid Kesehatan Masyarakat, DP3AP2KB yang diwakili Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta PKK Kabupaten Pelalawan.

Upaya dalam penurunan stunting terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengingat Kabupaten Pelalawan masuk ke dalam sepuluh kabupaten prioritas dalam penanganan stunting ini. Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang sedang melakukan pengimplementasian penurunan stunting, dari hasil penelitian ini program penurunan

stunting dikhususkan untuk calon pengantin, balita dan ibu hamil. Program penurunan stunting ini sudah dilaksanakan di seluruh desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang terjadi dalam pengimplementasian program penurunan stunting ini.

Berikut penulis uraikan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kabupaten Pelalawan yang dibagi ke dalam beberapa indikator penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi implementor dan pelaku kebijakan yang mengikuti pelaksanaan. Harmayani *et al.* (2024). Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang terkait dengan bagaimana mengimplementasi suatu kebijakan (Susanti, 2023). Hal ini seperti tanggapan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan yang diwawancarai diketahui bahwa pada penyuluhan di tingkat kelurahan sudah dilaksanakan secara berkala. Bidan puskesmas secara berkala memberikan informasi tentang stunting, apalagi program ini sudah menjadi program rutin mereka secara berjenjang.

b. Sumber Daya

Menurut Ajabar (2020), manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk memicu, meningkatkan, memotivasi dan memelihara kinerja karyawan secara maksimal dalam perusahaan dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metode. Isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implernentor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Kegiatan pemeliharaan terhadap SDM yang dilakukan perusahaan melakukan sasaran utama, yaitu tetap bertahannya SDM dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. SDM akan terdorong tetap bekerja memberikan tenaganya, kemampuannya, pikirannya dan waktunya bagi perusahaan (Siagian, 2023). Kondisi

tersebut mampu terwujud apabila ditunjang dengan kenyamanan kerja serta kesejahteraan pegawai yang memadai.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dan unit atas sampai unit pelaksana. Begitu juga dengan kebijakan mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Disposisi implementor mempengaruhi implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pelalawan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang ulang dalam badan badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan (Kurniawan *et al.*, 2018). Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standart Operating Procedure* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi ke arah yang lebih baik adalah : 1. Membuat *Standart Operating Procedure* (*SOP*) yang lebih fleksible. 2. Melakukan fragmentasi.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator komunikasi, pada proses sosialisasi belum dilakukan secara optimal oleh OPD terkait.
2. Berdasarkan indikator sumber daya yaitu secara kualitas, SDM tenaga kesehatan di lapangan sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penanganan stunting. Namun, untuk kader posyandu sebaiknya diberikan pelatihan secara berkala. terutama terkait mengenai anak yang beresiko stunting dan penanganannya. Secara kuantitas, jumlah SDM dalam tim pendamping kebijakan berjumlah 1.726 orang yang terdiri dari tim pendamping keluarga berjumlah 1.632 orang dan tim pendamping sosial (PKH) berjumlah 94 orang.
3. Berdasarkan indikator disposisi yaitu kurangnya respon dari masyarakat mengenai program stunting, penolakan yang diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci menyangkut kepercayaan atau agama.
4. Kemudian faktor penghambat pada indikator struktur birokrasi, belum ada SOP yang secara khusus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi oleh bidan puskesmas dan kelurahan, tetapi metode penyampaian informasi yang cenderung formal kurang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara mendalam. Dari segi sumber daya, jumlah kader posyandu di wilayah ini masih kurang dari standar yang ditetapkan, meskipun tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi yang memadai. Pelatihan berkala bagi kader posyandu perlu dilakukan agar mereka lebih mampu menangani anak-anak berisiko stunting. Pada aspek disposisi, meskipun implementor kebijakan memiliki komitmen yang baik, penerimaan masyarakat terhadap program masih terkendala oleh faktor kepercayaan atau keyakinan agama tertentu. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) khusus untuk percepatan penurunan stunting mengakibatkan pelaksanaan kebijakan kurang terarah, meski pengawasan rutin telah dilakukan setiap tiga bulan.

Hambatan utama lainnya adalah kurangnya keterlibatan lintas sektor serta keterbatasan sumber daya di tingkat lokal, yang memperlambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi yang lebih interaktif dan berbasis komunitas untuk memperluas pemahaman masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan jumlah kader posyandu dan pelatihan berkala, serta penyusunan SOP khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih terstruktur. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat guna mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan prevalensi stunting di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat menurun secara signifikan, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajabar. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Aryastami, N. (2017). *Intervensi 1000 hari pertama kehidupan: Dasar untuk mencegah stunting*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Program percepatan penurunan stunting*. Jakarta: BKKBN.
- Harmayani, N., Syarif Makmur, & Bantilan, M. M. (2024). Implementasi kebijakan layanan pengadaan barang jasa secara elektronik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 1-20. <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/index>
- Hawi, A., Afnibar, S. N. U., Syaifulloh, M., & Mukhlis, H. (2020). Emotional and social character development during growth period. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2013–2018..
- Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2018). Implementasi struktur birokrasi strategi pertahanan laut menghadapi ancaman di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 4(1).
- Masithah, S., Soekirman, & Martianto, D. (2005). *Pola asuh dan status gizi anak balita*. Jakarta: Pusat Kajian Gizi.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pratiwi, D., Masrul, & Yerizal. (2016). *Hubungan pola asuh dan status gizi anak*. Padang: Universitas Andalas.

- Primanto, A., Puspitasari, L. (2024). Kebijakan Penanganan Penurunan Angka Stunting di Indonesia. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 4(2). 405. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i2.332>. 19 Desember 2024.
- Siagian, S. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. Semarang: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Susanti, D. (2023). Implementasi aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 429–442